

PERAN PEMERINTAH MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN TINGKULU KECAMATAN WANEA KOTA MANADO¹

Oleh : Vita Yohana Nuah²

ABSTRAK

Kelurahan Tingkulu merupakan salah satu dari sebelas kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Wanea Kota Manado, juga merupakan pemekaran dari wilayah Kecamatan Sario. Mayoritas penduduk Kelurahan Tingkulu adalah campuran dari etnis Minahasa dan Sangihe. Kawasan Kelurahan Tingkulu merupakan Kelurahan yang di apit oleh berbagai sektor, seperti sekolah, perkantoran pemerintah dan swasta, komersial, dan pemukiman penduduk.

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode deskriptif, yaitu setiap data-data dan fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian di lapangan dideskriptifkan atau digambarkan sebagaimana adanya yang diiringi dengan penafsiran dan analisis yang rasional. Untuk itu analisa data dalam penelitian ini adalah menggambarkan dan menjelaskan variabel-variabel yang berkaitan dengan peranan Pemerintah Kelurahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Melalui penyajian data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian di Kelurahan Tingkulu, baik dengan melakukan wawancara dengan lurah, sekretaris Kelurahan sebagai informan kunci dan tokoh masyarakat sebagai informan utama serta studi kepustakaan, maka akan dilakukan analisa terhadap setiap data dan fakta-fakta yang telah didapat melalui interpretasi dan penguraian masalah-masalah yang terjadi.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pembangunan Kelurahan Tingkuluk

PENDAHULUAN

Kelurahan merupakan lembaga satuan terkecil diantara perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada konteks otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

¹ Merupakan Skripsi Penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 229 ayat 2 disebutkan bahwa: perangkat daerah terdiri atas: Kabupaten/Kota, Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, hal ini pula masih sama dengan landasan hukum tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 120 ayat 2. Otonomi daerah sendiri dimaknai sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 angka 6 UU 23 tahun 2014).

Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005. Disebutkan Lurah haruslah memiliki syarat-syarat berupa kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami kondisi sosial budaya masyarakat setempat, selain itu masa kerja minimal 10 tahun dan pangkat/golongan minimal III/c (pasal 4). Maka tak heran apabila penempatan jabatan Lurah oleh Bupati/Walikota sering dikaitkan dengan istilah *The Right Man On The Right Place*, sebab pertimbangan akan kemampuan pemahaman wilayah terkadang menjadi pertimbangan bagi Bupati/Walikota dalam menempatkan Lurah, karena Lurah merupakan bentuk jabatan karier yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Berbeda dengan jabatan politis berdasarkan hasil pemilihan seperti pada Lurah ataupun Bupati/Walikota.

Berbicara pembangunan daerah, maka tidak terlepas dari peran partisipasi masyarakat yang dapat ditinjau melalui kerangka manajemen pemerintahan *good governance*. Adanya *good governance* menurut Giddens merupakan reformasi terhadap tata penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan yang diarahkan pada pembangunan manajemen tata kelola pemerintahan bukan hanya pada pemerintah. Kebijakan tidak lagi tersentralisasi pada peran pemerintah, melainkan melibatkan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah.

Adanya peran aktif atau partisipasi dari masyarakat merupakan bentuk konsep pembangunan daerah dengan cara pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah konsep pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat yang melibatkan nilai-nilai sosial. Chambers menjelaskan konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people centred, participatory, empowering, and sustainable* (Huraerah, 2008:81). Disinilah letak Lurah berperan dengan penggunaan kewenangannya sebagai pemimpin. Melalui kesan formal yang melekat sebagai seorang pemimpin. Selain bertugas secara administratif dan memberikan pelayanan umum beserta kelengkapan infrastrukturnya, Lurah sebagai pemimpin mempunyai tugas dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan program pembangunan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, Kelurahan tidak bekerja sendirian, melainkan bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai implementasi keberlanjutan dari *good governance* pada tingkat Kelurahan.

Pada dasarnya program pemerintah seperti program pembangunan sangat memerlukan kontribusi dari masyarakat, karena keberhasilan program pembangunan

ini tergantung dari tingkat partisipasi masyarakat, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka, semakin tinggi tingkat keberhasilannya, begitupun sebaliknya. Untuk itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan guna menunjang keberhasilan dari program pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan wujud dari terciptanya kemauan masyarakat dalam suatu program pemerintah khususnya program pembangunan bagi masyarakat. Salah satu wujud kemauan itu dengan adanya sikap mendukung terhadap penyelenggaraan program pemerintah yang ditujukan melalui partisipasi aktif anggota masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat difungsikan sebagai faktor penentu keberhasilan sebuah program pemerintah. Menurut Nasution (2009:42) bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dan Kelurahan juga tidak terlepas dari adanya peran serta atau partisipasi aktif anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi ditunjuk guna mewujudkan masyarakat sejahtera di daerah atau Kelurahan yang bersangkutan. Oleh sebab itu tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan di daerah atau di Kelurahan tidak saja ditangan kepala daerah atau lurah tetapi juga di tangan masyarakat tersebut.

Perubahan secara global telah memacu persaingan yang semakin tajam di berbagai sektor, baik ditingkat nasional maupun tindakan daerah. Kondisi ini tidak dapat dihindarkan, oleh karena birokrasi pemerintah perlu melakukan perbaikan serta mencari alternatif baru guna merubah pandangan masyarakat yang selama ini menganggap bahwa birokrasi pemerintah telalu lamban dalam memenuhi kebutuhan mereka. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah didalam memenuhi keinginan atau kebutuhannya semakin kuat, hal ini tentunya harus dilakukan melalui manajemen dan administrasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, termasuk didalamnya adalah Pemerintah Kelurahan Tingkulu.

Kelurahan Tingkulu merupakan salah satu dari sebelas kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Wanea Kota Manado, juga merupakan pemekaran dari wilayah Kecamatan Sario. Mayoritas penduduk Kelurahan Tingkulu adalah campuran dari etnis minahasa dan sangihe. Kawasan Kelurahan Tingkulu merupakan Kelurahan yang di apit oleh berbagai sektor, seperti sekolah, perkantoran pemerintah dan swasta, komersial, dan pemukiman penduduk.

Dalam pengamatan awal peneliti mengenai partisipasi masyarakat khusus dikelurahan Tingkulu dapat dikatakan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan pemberian diri masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan pembangunan, namun partisipasi masyarakat ini hanya didapati pada satu faktor saja, yaitu partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan rohani (gereja), seperti pada pembangunan gereja, masyarakat sangat aktif berpartisipasi memberikan tenaga, waktu, bahkan materi/uang untuk kelangsungan penyelesaian gereja tersebut, berbeda halnya pada saat pembangunan fasilitas umum lainnya, seperti jalan, saluran pembuangan air, pengelolaan sampah, dalam hal ini masyarakat terkesan bersikap apatis, karena sebagai suatu daerah kota, setiap pembangunan infrastruktur sumber

pembiaayaannya berasal dari pemerintah, sehingga selama ini masyarakat jarang dilibatkan, sebagai contoh pada saat pembangunan saluran pembuangan air yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 lalu, proyek pembangunan tersebut sudah ada yang melaksanakannya, sehingga masyarakat hanya menerima karena semuanya sudah dilaksanakan oleh instansi berwenang.

Begitu juga halnya dengan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, di kelurahan Tingkulu khususnya yang berada pada Lingkungan VII dan Lingkungan VIII, banyak didapati kondisi lingkungan yang kotor, jalan-jalan yang dipenuhi dengan sampah yang berserakan, tidak ada kepedulian warga untuk membersihkannya, sekalipun ada sifatnya hanyalah temporer, seperti apabila kelurahan tingkulu akan menjadi tuan rumah pada kegiatan kerohanian tertentu seperti yang baru-baru ini dilaksanakan adalah menjadi tuan rumah kegiatan pesta seni gerejawi Pria Kaum Bapa GMIM, pada saat itu masyarakat sangat aktif berpartisipasi untuk menjaga kebersihan lingkungan, bahkan turut serta berpartisipasi melalui tenaga membangun segala bentuk persiapan yang diperlukan, bahkan bukan hanya dari jemaat GMIM tetapi dari jemaat-jemaat gereja lainnya.

Partisipasi yang diberikan oleh masyarakat kelurahan tingkulu murni dilakukan dengan berdasarkan kesadaran sebagai warga jemaat terlebih khusus, dipihak pemerintah dalam hal ini pemerintah kelurahan Tingkulu sangat jarang terlibat untuk memberdayakan masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasinya, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan baru yang menghubungkan Lingkungan VIII tembus kearah jalan lingkar (ringroad), keterlibatan masyarakat sangat kurang, hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah kelurahan itu sendiri untuk membangkitkan partisipasi masyarakat, sesuai dengan pengamatan peneliti, pemerintah kelurahan dirasa jarang memberikan arahan-arahan, sosialisasi, bahkan ajakan untuk masyarakat agar berpartisipasi.

Peran pemerintah kelurahan yang dimaksudkan adalah melalui yang pertama fungsi instruktif yaitu memberikan perintah dan petunjuk bagaimana melaksanakan suatu pembangunan yang tentunya melibatkan masyarakat, yang kedua melalui fungsi konsultatif, yaitu bagaimana cara dalam menetapkan tujuan yang diharapkan melalui pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, yang ketiga melalui fungsi partisipatif yaitu mengkatifkan atau melibatkan orang-orang dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya, dan yang keempat, melaksanakan fungsi delegatif yaitu memberikan kewenangan kepada kepala-kepala lingkungan sebagai unsur perangkat kelurahan dan bagian yang terdekat dengan masyarakat untuk melaksanakan sosialisasi termasuk program pembangunan.

Berdasarkan uraian partisipasi masyarakat tersebut, peneliti mengidentifikasi suatu permasalahan penelitian ini yaitu: partisipasi masyarakat kelurahan tingkulu dapat dikatakan sudah baik pada kegiatan-kegiatan tertentu khususnya pada kegiatan kerohanian, namun untuk kegiatan pembangunan yang sifatnya pembangunan fasilitas umum, partisipasi masyarakat masih belum meningkat, dari pihak pemerintah kelurahan sendiri jarang memberikan arahan, sosialisasi, bahkan ajakan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan, berdasarkan

asumsi tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji melalui suatu penelitian ilmiah mengenai peran pemerintah kelurahan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Peran Pemerintah Kelurahan

Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989)

Menurut Soekanto (1990:268) peran meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Artinya adalah posisi yang dimiliki seseorang tersebut seperti lurah yang merupakan pemerintahan Kelurahan, dengan posisi tersebut pemerintah Kelurahan akan lebih memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Adapun peranan seseorang seperti yang dikatakan oleh Levinson (1996:204) meliputi:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan disini di artikan sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Sedangkan menurut Veithzal Rivai (2004:148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut Ali (2000: 304) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu peristiwa. Pendapat Ali tersebut mengandung maksud yaitu dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki tanggungan dalam kehidupan sosial akan lebih besar peran dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok maupun masyarakat untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat tersebut. Partisipasi dapat di definisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Partisipasi dapat dipahami dalam dua hal yaitu: pertama, partisipasi merupakan sebuah alat, dimana partisipasi dilihat sebagai sebuah teknik untuk membantu memajukan program Kelurahan atau disebut pembangunan partisipasi. Kedua, partisipasi sebagai sebuah tujuan itu sendiri yang dapat dinyatakan sebagai pemberdayaan rakyat yang dipandang dari segi perolehan keahlian, pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk membangun.

Partisipasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu tindakan ikut mengambil bagian, keikutsertaan atau ikut serta. Menurut Juliantara (2004:84) partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga Negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif.

Di dalam suatu masyarakat yang sudah berkembang, maka tingkat partisipasi masyarakat tersebutpun boleh dikatakan cukup baik, tingkat ini tergantung dari kesadaran masyarakat adalah tanggung jawabnya terhadap pembangunan, rasa tanggung jawab dan kesadaran ini harus muncul apabila mereka dapat menyetujui suatu hal atau dapat menyerap suatu nilai. Untuk itulah diperlukan adanya perubahan sikap mental kearah yang lebih baik yang dapat mendukung pembangunan.

Menurut Adisasmita (2006:38) partisipasi masyarakat dapat di definisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan.

Peningkatan partisipasi masyarakat tersebut merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowerment) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat (Kelurahan). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat Kelurahan secara lebih aktif dan efisien, yaitu dalam hal sebagai berikut:

- a. Aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi)
- b. Aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan)
- c. Aspek keluar atau output (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi)

Partisipasi masyarakat telah sekian lama diperbincangkan dan didengarkan dalam berbagai forum dan kesempatan. Intinya adalah agar masyarakat umum atau sebanyaknya orang ikut serta dengan pemerintah memberikan bantuan guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat, dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan. Maka secara umum partisipasi dapat diartikan sebagian "pengikutsertaan" atau pengambilan bagian dalam kegiatan bersama.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kualitatif yaitu yang dapat diartikan menurut Nawawi (1989:63) sebagai pemecahan masalah yang

diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana.

Dalam penelitian ini memfokuskan pada peran pemerintah kelurahan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ada di kelurahan tingkulu kecamatan waneakota manado

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado Sulawesi Utara, untuk memperoleh data yang diperlukan menjawab permasalahan penelitian, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu; Pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan berbagai dokumen tertulis tentang kondisi umum Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado seperti, profil Kelurahan Tingkulu, dan data-data lain yang berkaitan dengan Kelurahan Tingkulu. Kedua, penulis melakukan pengumpulan data mengenai Peranan Pemerintah Kelurahan untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Ketiga, penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yang sudah ditetapkan untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta yang lebih komprehensif menyangkut permasalahan penelitian.

Wawancara adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi dari para informan tentang peranan Pemerintah Kelurahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sesuai dengan fokus penelitian telah ditetapkan jumlah informan yang akan dilakukan wawancara. Tipe wawancara yang dipilih oleh penulis adalah tipe wawancara berstruktur, dimana sebelum memulai wawancara terlebih dahulu penulis menyusun daftar pertanyaan yang diajukan. pertanyaan-pertanyaan yang disusun sudah pasti berhubungan dengan peranan pemerintah Kelurahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut. Namun, di dalam prosesnya sendiri penulis tidak menutup kemungkinan akan munculnya pertanyaan-pertanyaan baru yang dapat menggali informasi lebih dalam dari para informan.

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode deskriptif, yaitu setiap data-data dan fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian di lapangan dideskriptifkan atau digambarkan sebagaimana adanya yang diiringi dengan penafsiran dan analisis yang rasional. Untuk itu analisa data dalam penelitian ini adalah menggambarkan dan menjelaskan variabel-variabel yang berkaitan dengan peranan Pemerintah Kelurahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Melalui penyajian data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian di Kelurahan Tingkulu, baik dengan melakukan wawancara dengan lurah, sekretaris Kelurahan sebagai informan kunci dan tokoh masyarakat sebagai informan utama serta studi kepustakaan, maka akan dilakukan analisa terhadap setiap data dan fakta-

fakta yang telah didapat melalui interpretasi dan penguraian masalah-masalah yang terjadi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa partisipasi masyarakat Kelurahan Tingkulu dalam bentuk tenaga (Gotong-Royong) masih kurang. Untuk melaksanakan suatu pembangunan partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan. Partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa partisipasi dalam kegiatan perencanaan, partisipasi ikut serta dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan di Kelurahan. Namun tidak hal yang mudah dalam membangun partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha yang dapat membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Adapun hal yang dapat dilakukan adalah dengan pemberdayaan masyarakat oleh perangkat Kelurahan. Diharapkan dengan adanya pemberdayaan masyarakat, pembangunan Kelurahan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi dan kondisi yang lebih baik dari saat ini. Dilaksanakannya proses pembangunan ini tidak lain karena masyarakat tidak puas dengan keadaan saat ini yang dirasakan oleh masyarakat kurang ideal. Namun demikian, perlu disadari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi, sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah yang sedang dihadapi. Pembangunan Kelurahan hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila Kelurahan tersebut memiliki sarana dan prasarana yang lengkap atau paling tidak pembangunan yang dilakukan dapat mendukung kemajuan masyarakat, baik dalam kemajuan di bidang ekonomi, sosial dan pendidikan masyarakat. Namun pembangunan yang dilakukan khususnya pembangunan Kelurahan tersebut tidak akan dapat tercapai apabila masyarakat dan pemerintah tidak saling bekerjasama untuk kemajuan Kelurahan. Adanya kerjasama antara Pemerintah Kelurahan dengan masyarakat tergantung kepada Pemerintah Kelurahan yaitu lurah dan aparat Kelurahan, karena merekalah pemimpin atau aktor dalam terlaksananya pembangunan Kelurahan yang dilakukan, dimana

Pemerintah Kelurahan berperan dalam menumbuhkan kesadaran warga Kelurahan untuk berperan serta dalam pembangunan yaitu berpartisipasi untuk keberhasilan pembangunan. Di Kelurahan Tingkulu pembangunan yang dilakukan masih relatif rendah, bahkan bisa dikatakan minim. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas untuk mengadakan rapat tidak ada, sehingga rapat atau pertemuan-pertemuan seringkali dilakukan di mesjid atau di rumah lurah.

Suatu pembangunan dikatakan berhasil apabila pembangunan yang dilakukan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, tanpa ada yang merasa dirugikan. Namun pembangunan di Kelurahan Tingkulu ada yang sudah dapat dinikmati oleh masyarakat. Adapun pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah pembangunan rumah layak huni, dimana sudah lumayan banyak dan layak dihuni atau ditempati oleh masyarakat. Disamping pembangunan yang

sudah dapat dinikmati oleh masyarakat, masih adanya pembangunan yang telah dilakukan di Kelurahan Tingkulu yang tidak dapat dinikmati, yaitu pembangunan sumur bor. Pembangunan sumur bor ini dirasakan oleh masyarakat tidak bermanfaat, dimana air yang dihasilkan dari pengeboran sumur ini tidak layak untuk dikonsumsi. Air yang dihasilkan adalah air yang keruh dan berbau, sehingga sangat tidak mungkin lagi masyarakat meminumnya.

Pembangunan lain yang masih kurang dapat dinikmati oleh masyarakat di Kelurahan Tingkulu adalah pembangunan jalan yang menghubungkan Kelurahan Tingkulu dengan Kelurahan Pasar Baru. Dengan demikian masyarakat masih tetap merasakan sulitnya untuk memasarkan hasil-hasil pertanian dan perkebunan yang dihasilkan dari Kelurahan Tingkulu. Padahal tujuan dilakukannya pembangunan jalan di Kelurahan Tingkulu ini adalah untuk memudahkan para petani untuk memasarkan hasil pertanian dan perkebunannya, dengan demikian taraf hidup masyarakat Kelurahan Tingkulu dapat meningkat.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan yang dilakukan di Kelurahan Tingkulu masih belum tepat sasaran dan kurang sesuai dengan pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat Kelurahan Tingkulu, atau dapat dikatakan pembangunannya belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai hasil akhir penelitian tentang Peranan Pemerintah Kelurahan untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan di Kelurahan Tingkulu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah Kelurahan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan pemerintah Kelurahan Tingkulu telah melakukan upaya dan perannya, seperti mengajak masyarakat untuk ikut dalam berbagai kegiatan Kelurahan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan isi, tujuan, dan maksud dari setiap program-program pembangunan yang ingin dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan masyarakat sebagai faktor pendukungnya dinyatakan kurang baik bila dilihat dari rendahnya partisipasi masyarakat Kelurahan Tingkulu.
2. Pemerintah kelurahan dalam melaksanakan fungsinya dikelurahan tingkulu berdasar hasil penelitiannya sudah maksimal yaitu dengan melihat pemerintah dalam mengajak dan melibatkan langsung masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang ada.
3. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, masyarakat Kelurahan Tingkulu sudah merasakan peran Pemerintah Kelurahan dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. yaitu dengan ikut terlibatnya pemerintah dalam pembangunan dikelurahan tingkulu.

4. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan dalam bentuk uang atau benda, partisipasi masyarakat dalam bentuk ide dan pikiran serta partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga (gotong-royong) berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan masih rendah, hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat status sosial ekonomi rata-rata masyarakat Kelurahan, rendahnya tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Kelurahan, serta dikarenakan kesibukan masyarakat Kelurahan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Saran

Setelah melihat kesimpulan di atas, ada hal-hal yang perlu penulis sarankan sebagai masukan untuk lebih meningkatkan lagi kualitas maupun kuantitas pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Tingkulu, antara lain:

1. Agar pemerintah Kelurahan Tingkulu sebagai penggerak dan motivator dalam pembangunan Kelurahan lebih maksimal lagi, maka pemerintah Kelurahan Tingkulu alangkah lebih baik lagi apabila mencari alternatif-alternatif lain yang dapat digunakan sebagai wadah atau saluran untuk menyampaikan informasi dari setiap program pembangunan
2. Pemerintah Kelurahan hendaknya lebih lagi memotivasi masyarakat dengan menyadarkan masyarakat bahwa setiap program-program pembangunan yang dilaksanakan akan dapat meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian maka akan sangat mendukung keberhasilan program-program pembangunan Kelurahan yang dilakukan.
3. Pemerintah Kelurahan untuk lebih tegas lagi dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya supaya tujuan dari pada pelaksanaan pembangunan berjalan dengan lancar baik dalam mengintruksikan kepada aparat Kelurahan maupun masyarakat apa yang akan di rencanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gary. 2005. *Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.
- Hadari Nawawi, 2000, *MSDM untuk Bisnis yang Kompetitif*, Yogyakarta University Press, Yogyakarta
- Huraerah, Abu. *Pengorganisasian Pengembangan Masyarakat Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Bandung: Humaniora, 2008. ..
- Ketaren, Nurlela. 2008. *Aministrasi Pembangunan*, USU: Word Press
- Koentjaraningrat. 1998. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama..
- Randy, Riant. 2006. *Managemen Pembangunan Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia
- Rivai Veithzal, *Kepemimpinan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004 Universitas Sumatera Utara
- Rivai. 2005:51 *Fungsi Penelitian*

Safi'i, M. 2007. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Persepektif Teoritik*. Malang: Averroes Press

Suradinata, Ermaya, 2002, *Manajemen Pemerintahan Dan Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Vidcodata.

Suroto. *Pembanguanan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Rakyat*

Sumber lainnya

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah

Undang-Undang nomor 23 tahun 2004

Peraturan Pemerintah Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

Keputusan Walikota Manado Nomor 64 tahun 2008

Kamus Bahasa Indonesia 1989